

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Nur Ilhami
NPP.31.0469

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kebijakan Publik
Email : nurilhami123@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Anwar Rosshad, S.H., M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): There has been an increase in national waste generation from 2019 to 2022. Banyumas Regency is one of the successful regions in the field of Smart Green ASEAN. However, there are still several problems, the amount of waste generated per day in Banyumas Regency reached 1656.2 m³/day in 2020 and increased to 1790 m³/day in 2021. Another problem is the breadth of the scope of waste services. The total area of the district that has not been served by waste is 221.98 km² or 22,198 Ha. **Objective:** This study aims to find out and describe the evaluation of waste management policies in Banyumas Regency, its inhibiting factors and the efforts of the Banyumas Regency Environmental Service in overcoming these inhibiting factors. **Method:** In this study, the researcher used a descriptive qualitative method, this method is considered the most suitable because it is easy to adjust to conditions and changes in the field. Then the data collection technique was acknowledged through observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** Based on the analysis conducted by the researcher, waste management in Banyumas Regency has not run optimally, because it is still not efficient, adequate, and evenly distributed, but from the effective aspect it has been quite effective and the aspect of the accuracy of this policy is right on its goals and targets. The factors that hinder the implementation of waste management in Banyumas Regency are the lack of public awareness and budget limitations as well as inadequate infrastructure of waste service facilities and infrastructure. The efforts made are to increase socialization and education to the community and improve adequate waste management facilities and infrastructure. **Conclusion:** From the results of this study, it can be concluded that waste management in Banyumas Regency has not run optimally, because there are still several aspects that need to be improved.

Keywords: Policy, Evaluation, Waste Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Terjadi peningkatan timbulan sampah nasional dari tahun 2019 hingga 2022. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang berhasil dalam bidang *Smart Green ASEAN*. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan, jumlah timbulan sampah perhari di Kabupaten Banyumas mencapai 1656,2 m³/hari pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1790 m³/hari pada tahun 2021. Permasalahan yang lain adalah luasnya cakupan pelayanan persampahan. Total area kabupaten yang belum terlayani sampahnya adalah 221,98

km² atau 22.198 Ha. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, faktor penghambatnya dan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini dianggap paling cocok karena mudah menyesuaikan terhadap kondisi dan perubahan di lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih belum efisien, memadai, dan merata, tetapi dari aspek efektif sudah berjalan cukup efektif serta aspek ketepatan kebijakan ini sudah tepat pada tujuan dan Sasarannya. Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran serta infrastruktur sarana dan prasarana layanan persampahan yang belum memadai. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. **Kata Kunci:** Kebijakan, Evaluasi, Pengelolaan Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya kehidupan manusia ke arah modernisasi dan meningkatnya jumlah populasi manusia mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah sampah yang membawa dampak buruk bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia akan menghasilkan sampah saat melakukan aktivitas sehari-hari baik itu sampah organik maupun anorganik. Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007)

Menurut World Health Organization (WHO), sampah dapat didefinisikan sebagai benda yang berasal dari aktivitas manusia yang telah kehilangan fungsinya, baik karena tidak digunakan lagi, tidak diinginkan, atau sengaja dibuang (Budiman, 2006). Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, karena pengolahan atau sudah tidak ada masalahnya ditinjau dari sosial ekonomi tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian dan keberadaannya menguraingi kebersihan (Hadiwiyoto, 1983). Secara fisik, sampah terdiri dari bahan yang telah digunakan tetapi memiliki nilai dan kegunaan yang berbeda. Sampah bisa berasal dari berbagai sumber. Beberapa di antaranya mencakup limbah yang timbul dari permukiman penduduk, sampah yang dihasilkan di tempat umum seperti fasilitas-fasilitas umum, limbah dari lingkungan perkantoran, serta limbah industri, dan sumber-sumber lainnya.

Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan sebuah komunitas negara-negara di seluruh dunia telah menyetujui bersama mengenai visi pembangunan dunia yang terdiri dari 17 arah prioritas pembangunan dunia dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu dari tujuh belas indikator pembangunan dunia adalah akses air bersih dan sanitasi yang

layak bagi masyarakat. Indikator ini secara eksplisit menjelaskan tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam ayat tersebut diungkapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan warganya, termasuk upaya konkret dalam pengelolaan sampah demi menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kehidupan lingkungan yang baik dan sehat tidak hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga menjadi komitmen penuh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

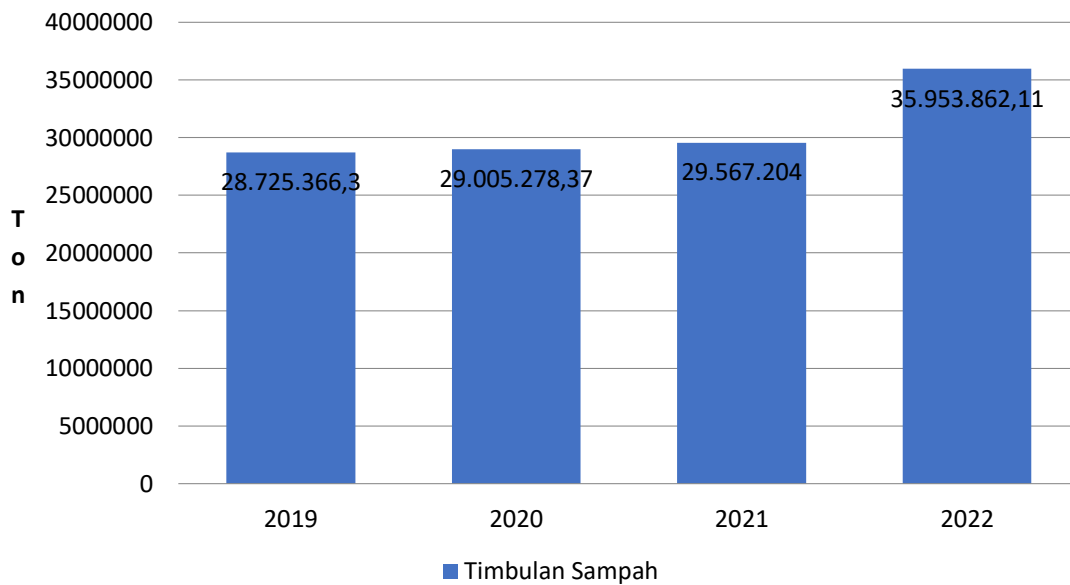
Melihat jumlah timbulan sampah nasional pada tahun 2019-2022, sangatlah memprihatinkan karena jumlah timbulan sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dampak yang ditimbulkan oleh sampah menjadi ancaman bagi masyarakat karena dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam upaya menangani sampah, Kabupaten Banyumas melakukan perubahan kebijakan pengelolaan sampah dari sistem *open dumping* menjadi pengelolaan sampah berbasis dari sumbernya, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Pandangan masyarakat masih cenderung memandang bahwa kebijakan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab bersama individu atau rumah tangga (Putranto et al., 2022)

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Sampah dalam pengertian yang berbeda dikemukakan oleh (Sejati, 2009) sampah adalah materi yang dikeluarkan atau tidak terpakai lagi, berasal dari aktivitas manusia atau alam yang tidak lagi memiliki nilai atau kegunaan karena telah dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagai hasil dari suatu aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selagi manusia masih beraktivitas. Sampah merupakan salah satu masalah kompleks yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Sampah bukanlah hanya sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sampah saat ini sudah menjadi masalah sosial yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Berikut adalah jumlah timbulan sampah nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Gambar 1.

Jumlah timbulan sampah tahunan nasional



Sumber: SIPSN, 2023

Dapat kita lihat bahwa peningkatan timbulan sampah nasional dari tahun 2019 hingga 2022 terus terjadi. Pada tahun 2019 timbulan sampah tahunan nasional yang dihasilkan adalah 28,7 juta ton. Di tahun 2020 timbulan sampah tahunan nasional mencapai 29 juta ton. Di tahun 2021 mengalami peningkatan timbulan sampah tahunan nasional menjadi 29,5 juta ton. Di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 35,9 juta ton timbulan sampah tahunan nasional.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia mencatat produksi sampah sebesar 35,93 juta ton sepanjang tahun 2022. Jika kita memperinci berdasarkan provinsi, Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah produksi sampah mencapai 5,76 juta ton, atau setara dengan 16,03% dari total sampah nasional pada tahun yang sama. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten dengan volume sampah yang cukup besar, berikut jumlah timbulan sampah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2020-2023.

Tabel 2.

Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kabupaten Banyumas tahun 2020-2023.

No	Kecamatan	Timbulan Sampah (m ³ / hari)			
		2020	2021	2022	2023
1	Lumbir	46,863	49,788	45,563	46,006
2	Wangon	77,007	54,815	65,241	66,253
3	Jatilawang	62,884	72,608	73,583	75,154
4	Rawalo	49,253	53,024	50,656	57,374
5	Kebasen	61,745	102,808	104,582	101,756
6	Kemranjen	67,154	82,085	77,884	68,681

7	Sumpiuh	53,731	58,091	48,357	59,874
8	Tambak	46,709	84,143	83,819	85,354
9	Somagede	34,819	53,226	54,357	58,361
10	Kalibagor	51,374	53,751	55,359	60,423
11	Banyumas	50,681	53,221	53,809	55,224
12	Patikraja	54,354	125,349	124,213	120,347
13	Purwojati	34,661	76,154	74,355	73,476
14	Ajibarang	97,566	61,255	67,227	69,398
15	Gumelar	49,457	89,766	91,248	87,116
16	Pekuncen	70,051	94,438	85,546	92,588
17	Cilongok	114,625	67,8	69,559	65,421
18	Karanglewas	60,324	53,794	57,216	49,385
19	Kedungbanteng	55,953	57,524	63,786	59,462
20	Baturraden	48,915	67,826	71,545	80,544
21	Sumbang	83,721	62,422	75,496	67,576
22	Kembaran	73,132	72,859	73,255	65,249
23	Sokaraja	80,445	66,891	70,874	68,562
24	Purwokerto Selatan	73,323	50,159	46,479	51,289
25	Purwokerto Barat	53,011	37,347	39,222	42,863
26	Purwokerto Timur	57,034	37,847	38,648	52,687
27	Purwokerto Utara	47,514	50,639	46,121	50,577
Jumlah		1.656,267	1.790	1.808	1.831

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2024

Permasalahan yang lain adalah luasnya cakupan pelayanan persampahan yang sesuai dengan luas Kabupaten Banyumas sebesar 132.949 Ha yang mencakup 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan. Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, hingga tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengelola 39 fasilitas pengelolaan sampah berupa TPST/PDU/TPS3R untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mengurangi residu yang dibuang ke TPA. Meskipun demikian, jumlah ini masih terbilang kurang, sebab seharusnya setiap desa atau kelurahan sepatutnya memiliki satu TPST/PDU/TPS3R. Beberapa kecamatan, seperti Lumbir, Purwojati, Gumelar, Kebasen, Kemranjen, Somagede, Tambak, dan Kedungbanteng, masih belum dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Total area kabupaten yang belum terlayani sampahnya adalah 221,98 km² atau 22.198 Ha.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi bahan referensi dalam penelitian ini yaitu: Pertama, jurnal dari Farih Rizqi Putranto, dkk yang berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, ditemukan beberapa masalah seperti ketidaklayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kebijakan pengelolaan sampah yang belum efektif, kurangnya komitmen masyarakat, dan keterbatasan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) (Putranto et al., 2022).

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Intan Muning Harjanti dan Pratamaningtyas Anggraini yang berjudul Pengelolaan Sampah Di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dinilai sudah cukup baik berdasarkan hasil observasi dan analisis. Fasilitas seperti saluran drainase, instalasi pengumpul dan pengolahan air lindi, pos kontrol operasional, pengontrol gas metana, serta berbagai alat berat telah tersedia (Harjanti & Anggraini, 2020).

Ketiga, jurnal yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditulis oleh Agung Dwi Putra, dkk. Hasil Penelitian menunjukkan dua faktor utama penyebab masalah sampah di sekitar kompleks perkantoran Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah keterbatasan arm roll truck (1 unit) dan jumlah timbulan sampah yang melebihi kapasitas armada saat ini (302,283 m³/hari). Kondisi ini mengakibatkan belum teratasinya permasalahan sampah di kawasan tersebut (Putra et al., 2022).

Keempat yaitu penelitian dari Kiki Hardiyanti, dkk yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak belum mencapai tingkat maksimal. Sistem open dumping yang masih digunakan mengakibatkan efektivitas yang belum optimal. Efisiensi terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana. Perataan dan responsivitas yang belum optimal menciptakan masalah seperti pengaduan dari masyarakat terkait bau dan air lindi dengan solusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak belum sepenuhnya menyelesaikan masalah (Hardiyanti et al., 2021).

Kelima, jurnal yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban yang ditulis oleh Agung Prasetya Mayangkara. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung sudah dijalankan namun belum maksimal karena masih terjadi masalah pada kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, ketepatan, perataan dan responsifitas (Mayangkara, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari Beberapa penelitian yang dilakukan di atas adalah sebagai perbandingan penulis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farih Rizqi Putranto, dkk (2022) yang menjadi persamaan adalah lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah peneliti membahas pengelolaan sampah dengan pendekatan analisis kebijakan menggunakan teori Patton dan Sawicky, sedangkan penulis membahas kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan evaluasi menggunakan teori William N. Dunn.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Intan Muning Harjanti dan Pratamaningtyas Anggraini (2020) memiliki persamaan pada pembahasan mengenai pengelolaan sampah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada pengelolaan sedangkan penulis berfokus pada evaluasi kebijakan.

Pada penelitian nomor 3 yang dilakukan oleh Agung Dwi Putra, dkk (2022) mempunyai persamaan pada fokus penelitian yaitu mengenai evaluasi pengelolaan sampah, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, metode, dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Pada penelitian nomor 4 yang dilakukan oleh Kiki Hardiyanti, dkk (2021) dan penelitian nomor 5 yang dilakukan oleh Agung Prasetya Mayangkara (2016)

memiliki persamaan yaitu berfokus pada evaluasi pengelolaan sampah dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah lokus yang diteliti berbeda, lokus penelitian saat ini dilakukan di Kabupaten Banyumas

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah; Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah; Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah

II. METODE

Nazir, (2013) mengemukakan bahwa: “penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan dalam meneliti fenomena yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan indikator-indikator tertentu. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian secara deskriptif adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Gambaran dan deskripsi tersebut dibuat secara akurat, faktual, dan sistematis berdasarkan hubungan dengan fenomena yang terjadi. Peneliti menggunakan teori yang disampaikan William N. Dunn (2003), aspek evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yakni: efektifitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Analisis data ialah penyusunan data secara sistematis agar data tersebut lebih mudah untuk ditafsirkan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dipaparkan sebagai berikut:

3.1.1 Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas

3.1.1 Efektifitas

Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan pencapaian yang telah terjadi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimensi efektifitas dapat dinilai dengan melihat sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan awal yang ditetapkan. Efektivitas juga melihat bagaimana suatu kebijakan dapat memberikan kebermanfaatan bagi sasaran kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila suatu kebijakan dalam pelaksanaannya telah mencapai tujuan dengan sasaran yang tepat serta memberikan nilai manfaat. Dari wawancara yang telah dilakukan penulis bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu Widodo Sugiri, S.T yang menyatakan bahwa. “Kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dari hulu sampai hilir saya rasa sudah cukup efektif, mengingat Kabupaten Banyumas sudah tidak menggunakan TPA

konvensional lagi dalam pemrosesan sampah melainkan menggunakan TPST yang di kelola oleh KSM yang merubah wajah baru dalam pengelolaan sampah agar sampah bisa lebih dimanfaatkan dan bernilai ekonomis”.

Dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah sebagian besar sudah memenuhi target. Namun masih ada yang perlu ditingkatkan yaitu cakupan layanan persampahan dan infrastruktur pengelolaan persampahan. Dengan meningkatkan cakupan layanan persampahan dan infrastruktur sarana prasarana layanan persampahan dapat meningkatkan tingkat efektifitas kebijakan pengelolaan sampah

3.1.2 Efisiensi

Dimensi efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan dalam menghasilkan tingkat keefektifan tertentu. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi dapat diukur dengan menghitung biaya dan manfaat program atau kebijakan tersebut serta mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya dan meningkatkan manfaat. Sumber anggaran kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Namun, karena keterbatasan dana dan pembangunan TPST memerlukan biaya yang sangat besar, maka pembangunannya dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk anggaran operasional TPST berasal dari iuran yang dikenakan kepada masyarakat yang berlangganan kepada KSM. Besarnya iuran sampah yang dikenakan kepada masyarakat juga bervariasi tergantung dari jumlah volume sampah yang dihasilkan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah sangat memerlukan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut sangat penting agar semua elemen masyarakat mengetahui dan kemudian berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta agar tidak terjadi *miss* informasi yang diterima oleh masyarakat

Dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dapat diambil garis besar kesimpulan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya terlaksana secara efisien. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran yang diperlukan untuk membangun TPST di setiap kecamatan. Pemerintah kabupaten banyumas masih terkendala dengan keterbatasan anggaran. Selain itu, upaya sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh kepada setiap masyarakat.

3.1.3 Kecukupan

Dimensi kecukupan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kecukupan ini dapat dilihat dari seberapa efektif kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah yang dihadapi, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih mempunyai beberapa permasalahan dalam proses penerapannya. Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup beliau

menyampaikan bahwa “Permasalahan yang terjadi pasca pembangunan yaitu KSM belum melaksanakan pengelolaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Masyarakat banyak yang mengeluhkan dampak adanya dari TPST yang menjadikan lingkungan di sekitar menjadi bau dan timbul lalat. Klasik sebenarnya. Namun hal itu dapat diatasi dengan penumpukan sampah yang tidak boleh melebihi 3 hari. Apabila KSM mampu menyelesaikan satu hari dioalah semua dan tidak ada tumpukan sampah maka hal itu dapat diatasi. Kemudian masih banyak mindset dari masyarakat yang ngolah sampah sendiri tidak mau dan bayar ke KSM juga tidak mau tetapi malah membuang sampah sembarangan dan mencemari lingkungan. Kan susah, makanya masih banyak beberapa titik tumpukan sampah yang saya sendiri tidak tahu berasal dari mana”

Pelaksanaan pengelolaan sampah belum dapat memenuhi kriteria kecukupan. Hal ini didukung dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, sedangkan salah satu tujuan dari pengelolaan sampah ini adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dalam mengelola sampah. Selain itu, masih banyak KSM yang perlu dilakukan edukasi kembali terkait dengan SOP yang harus dilakukan agar beberapa masalah lingkungan seperti bau yang tak sedap dan lalat dapat teratasi.

3.1.4 Perataan

Dalam konteks kebijakan, dimensi perataan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program dapat dilaksanakan secara merata dan memberikan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan harus adil, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara bersama-sama tanpa menciptakan suatu ketimpangan antar wilayah. Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Bidang Persampahan menyatakan bahwa “Saat ini Kabupaten Banyumas memiliki 39 fasilitas TPS3R atau PDU maupun TPST yang dapat mengefektifkan pengelolaan sampah, dengan rincian fasilitas TPS3R ada 28 dan TPST yang tersebar di luar Kota Purwokerto sejumlah 11 TPST. Kalau di Kota Purwokerto setiap kelurahan sudah ada TPS3R”

Dari tanggapan di atas dapat diketahui bahwa fasilitas TPS3R/PDU/TPST sudah hampir tersedia di setiap kelurahan yang ada di Kota Purwokerto, sedangkan untuk kecamatan di luar kota Purwokerto, masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas belum memenuhi indikator perataan.

3.1.5 Responsivitas

Dimensi responsivitas mengarah pada kemampuan kebijakan atau program untuk memberikan respon terkait perubahan maupun kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif. Dalam hal ini responsivitas dilihat dari bagaimana kebijakan atau program dalam memberikan umpan balik kepada masyarakat. Responsivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memberikan umpan balik kepada masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebijakan harus didesain dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu warga yang berlangganan pada KSM, Bapak Ari Prasetyo menyatakan bahwa “Pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik, saya sangat terbantu dengan adanya KSM yang mengelola

sampah. Lingkungan disekitar kompleks ini menjadi lebih bersih dan tidak ada tumpukan sampah di sembarang tempat”

Dari beberapa analisis terkait dengan responsivitas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dari respon kelompok sasaran sudah merasa puas dengan adanya program ini dan manfaat yang dirasakan sudah sangat membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun belum dapat sepenuhnya dikatakan responsif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara mandiri.

3.1.6 Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan publik mengacu pada seberapa efektif dan efisien sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Indikator ketepatan dapat dianalisis dengan melihat hasil yang telah didapatkan dengan kesesuaiannya terhadap manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program. Ketepatan menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat keberhasilan dari suatu kebijakan maupun program. Ketepatan kebijakan publik sangat penting karena memungkinkan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut terwujud dengan cara yang paling optimal dan efisien, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. Secara lebih luas, ketepatan kebijakan juga memastikan bahwa dampaknya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kemajuan nasional.

Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan terbesar karena produksi sampah sebagian besar berasal dari rumah tangga. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga sudah dilaksanakan namun apabila kesadaran masyarakat belum tumbuh maka akan sulit untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Sosialisasi kepada masyarakat bukan hanya tugas dari DLH namun tugas semua *stakeholder* di wilayah. Karena dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sosialisasi ini tidak akan berjalan dengan masif dan maksimal. *Stakeholder* kewilayahan masih beranggapan bahwa tugas pengelolaan sampah adalah tugas DLH padahal seharusnya *stakeholder* yang ada di wilayah harus turut menyukseskan program ini.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Hanya saja masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Komitmen dan upaya bersama merupakan kunci untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Banyumas.

3.2. Faktor Penghambat Berjalannya Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, karena tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, implementasi kebijakan tersebut akan sulit dilakukan. masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipatif masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mempunyai pola pikir bahwa sampah bukanlah barang yang bermanfaat, padahal sebenarnya sampah apabila diolah akan memiliki nilai jual yang tinggi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Banyumas masih tergolong rendah. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan sehingga mencemari lingkungan. Masih banyak ditemukan masyarakat tidak memanfaatkan pengelolaan di hulu dengan baik. Sebagian besar masyarakat masih enggan untuk memilah sampahnya sendiri. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sampah itu merupakan barang yang sudah tidak ada lagi harganya dan tidak berguna sehingga dibuang begitu saja

2. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur persampahan

Anggaran merupakan faktor yang penting untuk mendukung kegiatan dalam proses pelaksanaan kebijakan agar tetap berjalan. Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih mengalami keterbatasan anggaran. Anggaran yang diperlukan untuk membangun dan membeli peralatan mesin canggih yang modern sangatlah besar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa “Saat ini kita masih mengalami keterbatasan anggaran. Hal ini dikarenakan untuk pembangunan fasilitas layanan persampahan TPS3R/PDU/TPST membutuhkan biaya yang sangat mahal”

Sarana dan prasarana layanan persampahan yang memadai sangat diperlukan untuk kelancaran proses pengelolaan sampah. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan suatu kebijakan akan terhambat.

3.3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan sampah

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi agar kebijakan berjalan dengan baik dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, mengatakan bahwa “Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi berbagai masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Sosialisasi langkah awal dari pemerintah agar tidak ada kesalahpahaman dan masyarakat dapat turut berperan aktif. Pemerintah telah melakukan sosialisasi di setiap desa dan kelurahan yang akan dibangun TPST terkait dengan tata kelola sampah yang sesuai dengan inovasi Sumpah Beruang”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan kepada anggota organisasi dan yang berkaitan langsung dengan kebijakan yaitu kepada internal pegawai DLH, kepada anggota KSM Sampah dan kepada Masyarakat. Hal ini dilakukan guna menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah ini ada tiga tahap yaitu pengelolaan di hulu, pengelolaan di tengah dan pengelolaan di hilir. Pengelolaan di hulu dilakukan oleh masyarakat, pengelolaan di tengah dilakukan oleh TPST yang dikelola KSM, kemudian pengelolaan di hilir dilakukan oleh DLH di TPA BLE Banyumas.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sampah. Infrastruktur yang baik dapat mendukung proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara optimal. Dikarenakan diperlukan anggaran yang besar maka pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pembangunan secara bertahap. Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Bidang Persampahan

menyatakan bahwa “Dikarenakan keterbatasan anggaran sedangkan pengelolaan sampah dengan inovasi Sumpah Beruang memerlukan anggaran sangat besar maka pemerintah memutuskan untuk membangunnya secara bertahap. Alhamdulillah, saat ini Kabupaten Banyumas memiliki 39 fasilitas TPS3R atau PDU maupun TPST yang dapat mengefektifkan pengelolaan sampah, dengan rincian fasilitas TPS3R ada 28 dan TPST yang tersebar di luar Kota Purwokerto sejumlah 11 TPST. Kalau di Kota Purwokerto setiap kelurahan sudah ada TPS3R”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah mengambil langkah konkret dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Salah satu upayanya adalah dengan membangun TPS3R/TPST/PDU di berbagai lokasi. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Melalui pembangunan TPS3R/TPST/PDU diharapkan dapat mengurangi dampak negatif lingkungan yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pengelolaan sampah secara konvensional hanya mengatasi masalah secara sementara, tetapi juga menimbulkan berbagai macam permasalahan lainnya yang lebih kompleks. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lebih cepat mencapai kapasitas penuh dan memerlukan lahan yang lebih luas sebagai akibatnya. Di sekitar TPA, timbul berbagai masalah lingkungan, seperti polusi udara dan bau tak sedap dari tumpukan sampah yang meluas hingga mencemari sumur warga serta merambah ke area pertanian. Kabupaten Banyumas menginisiasi dan menerapkan inovasi berupa SUMPAH BERUANG (Sulap Sampah Berubah Uang) yang bertujuan untuk menangani masalah sampah secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, KSM tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan SOP yang ada, serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai karena keterbatasan anggaran

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih belum efisien, memadai, dan merata, tetapi dari aspek efektif sudah berjalan cukup efektif serta aspek ketepatan kebijakan ini sudah tepat pada tujuan dan sasarannya. Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran serta infrastuktur sarana dan prasarana layanan persampahan yang belum memadai. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

V. Terima Kasih

Ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada seluruh bapak ibu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang senantiasa membantu saya dalam penelitian saya. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penelitian saya.

VI. REFERENSI

- Chandra Budiman. (2006). Pengantar Kesehatan Lingkungan. In *Egc*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi keempat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press.
- Hadiwiyoto, S. (1983). Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. *Yayasan Idaya*.
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Hardiyanti, K., Purnaweni, H., & Sundarso, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*.
<https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4301>
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*.
<https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.9943>
- Mayangkara, A. P. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.
<https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1001>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja R.
- Nazir, M. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalla Indonesia.
- Nawawi, H. (2007). *Metode penelitian bidang sosial, Gajah Mada*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, A. D., Wiryono, W., Budiyanto, B., Susatya, A., & Uker, D. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*.
<https://doi.org/10.31186/naturalis.11.1.21159>
- Putranto, F. R., Yuniningsih, T., Dwimawanti, I. H., Profesor, J., & Soedarto, H. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1), 73–89.
- Sejati, K. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.